BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Perilaku Demokrasi

Perilaku menurut Skiner, seorang psikolog bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus.[1] Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, kemudian organisme tersebut merespons. Perilaku manusia merupakan hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia dan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.[2] Perilaku tersebut biasanya adalah respons seorang individu yang berasal dari luar ataupun dalam dirinya.

Dari beberapa pengertian perilaku dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku yang dimaksud adalah respons yang terjadi akibat adanya stimulus yang dapat berbentuk sebagai pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang dan tidak hanya sebagai gerakan badan atau ucapan tetapi juga pemahaman atas apa yang individu tersebut lakukan dari segala macam pengalaman serta interaksi masnusia dan lingkungannya.

Sedangkan demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[3]

---

[1] Bambang Syamsul Arifin. *Psikologi Sosial*, (Pustaka Setia: Bandung,2015), hlm.3
[2] *Ibid*.,hlm.2
[3] Busrizalti.*Pendidikan Kewarganegaraan negara kesatuan, HAM, dan Demokrasi, dan Ketaatan Nasional*, (Total Media: Yogyakarta, 2013), hlm.70.

Sedangkan menurut Sidney Hook demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.[4]

Perilaku demokratis menurut Malkian Elvani[5], adalah sikap hidup atau pandangan hidup yang demokratis. Hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Sedangkan demokratis yaitu perilaku saling menghargai pendapat satu sama lain yang berbeda pendapat, atau bahkan bertentangan. Perbedaan pendapat tidak hanya sekedar berbeda lalu berhenti namun diajak untuk membuat kesepakatan bersama secara terbuka dan saling menghormati.

Jadi demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi juga dipahami sebagai perilaku hidup atau pandangan hidup demokratis. Hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Perilaku demokratis merupakan respons yang terjadi akibat adanya stimulus yang dapat berbentuk sebagai pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang dan tidak hanya sebagai gerakan badan atau ucapan tetapi juga pemahaman yang dijadikan sikap atau pandangan hidup seperti saling menghargai pendapat satu sama lain yang

---

[4] Rozak, A. Ubaedillah dan Abdul, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006. hlm.9

[5] Malkian Elvani. *Gambaran Perilaku Masyarakat Demokratis,* (EGC: Jakarta,2010), hlm.7

berbeda pendapat, atau bahkan bertentangan. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga negara dan penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung hal tersebut merupakan perilaku yang demokrasi.

Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo dalam Murriam Budiardjo[6] ada delapan nilai demokrasi, yaitu:

(1) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela; Hal ini terlihat pada fungsi kompromi atau kebijakan umum dengan suara mayoritas. Atau penyelesaian berbagai pertikaian secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan terhadap golongan manapun.

(2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; misalnya saja dalam mengahadapi berbagai perubahan sosial, iptek yang sangat pesat dan dengan metode demokrasi diharapkan akan mampu untuk mengakomodasi secara fleksibel dengan memperhatikan pilihan publik sehingga perubahan perubahan tersebut tetap terjamin dan berjalan secara damai.

(3) pergantian penguasa dengan teratur; dalam demokrasi suksesi kepemimpinan didasarkan pada pilihan atau penunjukan oleh orang banyak dan dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dan dalam kurun periode tertentu.

(4) penggunaan paksaan sesedikit mungkin; dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik dalam demokrasi lebih mendasarkan pada kemauan umum atau persuasif, dibandingkan lewat paksaan fisik maupun non-fisik seperti ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.

---

[6] Muriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Gramedia: Jakarta, 2004), hlm.118.

(5) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman; demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keaneka-ragaman dan pentingnya saluran terbukadan kebebasan politik. Pengakuan dan jaminan nilai tersebut, karena adanya suatu keyakinan bahwa alternatif yang lebih banyak akan lebih dekat kepada kebaikan dan kebenaran.

(6) menegakkan keadilan; demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur persamaan.

(7) memajukan ilmu pengetahuan, dengan pengakuan dan jaminan adanya persamaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi pikiran, kreativitas, daya inovasi, afeksi, maka hal ini akan memberikan motivasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan, dalam demokrasi pengakuan dan penghormatan sangat dijunjung tinggi di kehidupan masyarakat dan bernegara karena hakikatnya setiap individu memiliki pemikiran yan berbeda-beda.

Sejalan dengan pendapatnya Henry B. Mayo, Zamroni[7] menjelaskan nilai-nilai demokratis itu adalah

(1) toleransi, adalah sikap saling tenggang rasa antar sesama dan dapat memahami adanya perbedaan antar sesama manusia.

(2) kebebasan mengemukakan pendapat, hal ini ditunjukan dengan kebebasan setiap individu dalam menyampaikan aspirasi dan juga pendapatnya dihadapan umum.

[7] Busrizalti. *op.cit.,* hlm.79.

(3) menghormati perbedaan pendapat, setelah adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya tentu saja pemikiran setiap kepala manusia akan berbeda maka agar tidak adanya perselisihan dibutuhkan juga saling menghormati perbedaan pendapat antar sesama.

(4) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, demokrasi mengajarkan seseorang untuk saling menghargai adanya perbedaan antar manusia baik itu ras, adat, suku, agama, dan lain halnya dalam masyarakat yang heterogen, demokrasi memiliki nilai tersebut untuk memahami adanya keanekaragaman tersebut.

(5) terbuka dan komunikasi, dalam demokrasi juga diperlukan adanya keterbukaan antar sesama dalam hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama atau publik, serta menyampaikannya dengan komunikasi yang baik dan sopan.

(6) menjunjung nilai dan martabat manusia, menjunjung nilai dalam hal ini adalah nilai yang dianut dalam masyarakat yang dianggap baik walaupun setiap masyarakat terkadang memiliki ukuran tersendiri akan nilai yang dianggap baik serta martabat manusia dengan cara misalnya menghargai, tidak berbuat anarkis, mengintimidasi, atau mengancam orang lain dengan cara yang tidak baik seperti salah satu nilai yang dijelaskan sebelumnya

(7) percaya diri, dalam demokrasi percaya diri dibutuhkan untuk keberanian dalam menyampaikan pendapat, percaya diri dalam menghadapi masalah, percaya diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

(8) tidak menggantungkan pada orang lain, setiap manusia pada hakikatnya saling membutuhkan orang lain namun ada hal hal tertentu yang seharusnya manusia tidak selalu menggantungkan pada orang lain seperti kewajibannya, pertanggung jawaban atas perbuatannya dan lain sebagainya yang tidak selalu bisa menggantungkan pada orang lain.

(9) saling menghargai, pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai oleh orang lain dan hal ini dimulai dengan diri sendiri untuk menghargai orang lain dan saling menghargai adalah salah satu kunci terciptanya suatu perilaku yang demokratis

(10) mampu mengekang diri, tidak berbeda jauh dengan toleransi, nilai mampu mengekang diri juga bertujuan agar terciptanya keselarasan antar manusia dengan cara membatasi diri dengan hak orang lain walaupun juga memiliki hak pribadi

(11) kebersamaan, demokrasi akan berjalan dengan baik jika sesama manusia saling menjaga kebersamaan baik dalam hubungan di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat berbangsa dan bernegara

(12) Keseimbangan dalam hal ini adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tugas baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, ataupun siswa disekolah.

Nilai-nilai demokrasi tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi.

Dari kedua nilai-nilai yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo dan juga Zamroni keduanya sama-sama membahas mengenai nilai-nilai demokrasi tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Henry B. Mayo melihat demokrasi dari segi pemerintahan dan juga politik, namun demokrasi bukanlah tentang bagaimana pemerintahan dijalankan dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi tetapi juga bagaimana warga negara dapat mempraktikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dapat juga diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di dalam keluarga, masyarakat dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu perilaku demokratis adalah respons yang terjadi akibat adanya stimulus yang dapat berbentuk sebagai pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang dan tidak hanya sebagai gerakan badan atau ucapan tetapi juga pemahaman yang dipelajari oleh seseorang individu yang telah melalui berbagai proses pembentukannya sehingga bereaksi terhadap situasi agar sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu adalah toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan serta keseimbangan.

B. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan awalnya dimulai dari sebuah Istilah *Civics*, *civic*, atau *civic education* yang sudah berkembang sejak lama. Konsep dasar *Civics* berasal dari Yunani yang berarti ilmu kewarganegaraan, yang secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *Civicus* yang berarti *Citizen* atau penduduk dari sebuah negara kota (*polis*).[8] Sehingga huruf *"s"* yang berada dibelakang kata *civic+s* mengandung arti ilmu sama halnya dengan kata *politics* dan *economics*. Civic dalam bahasa Romawi diartikan sebagai anggota atau warga dari suatu republik dizaman Romawi, sedangkan di zaman Yunani Athena diistilahkan *polites*. Selain itu di Perancis disebut dengan *citoyen*, sedangkan di Inggris disebut dengan *citizen* yang artinya adalah warga negara.

[8] Yuyus Kardiman dan Yasnita Yasin. *Ilmu Kewarganegaraan*. (Laboratorium Sosial Politik UNJ Press: Jakarta,2010), hlm.1

Civics sendiri adalah ilmu kewarganegaraan yang berisi suatu pelajaran tentang pengertian pemerintah dan kewajiban-kewajiban warga negara dan juga mempelajari hubungan antarwarganegara dan warga negara dengan negara.[9] Sementara Ahmad Sanusi memberikan pemahaman yang sederhana mengenai *Civics* yang menurutnya dipandang sebagai suatu disiplin ilmu politik, maka fokus kajiannya berkenaan dengan kedudukan dan peran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan karena tentunya setiap negara pasti akan berbeda-beda.[10]

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing, yaitu *civic education,* dan *citizenship education*. Dari kedua istilah tersebut nantinya terdapat kandungan konsep *civic* dan *citizenship*. Oleh karena itu perlu dijelaskan adanya empat istilah yaitu *civic, citizenship, civic education,* dan *citizenship education*.[11]

Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan. *Citizenship* atau kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsep *civis* atau *citizen*. Karena kewarganegaraan berarti seperangkat karakter sebagai warga. Kewarganegaraan itu menunjukan suatu keanggotaan dalam komunitas politik yang diawali dengan adanya sebuah polis atau negara kota di Yunani. Hal ini membuat kewarganegaraan membawa sebuah implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan secara penuh disebut sebagai *citizen*.

---

[9] Winarno. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bumi Aksara: Jakarta,2013), hlm.2
[10] Yuyus Kardiman dan Yasnita Yasin. *Op.Cit.,* hlm.3
[11] Winarno. *Op.Cit.,* hlm.1

Roger M. Smith mengatakan adanya empat makna dari kewarganegraan keempat makna tersebut yaitu:

> *Pertama* sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpatisipasi dalam proses pemerintahan; *kedua* sebagai status hukum yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat; *ketiga* keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada asosiasi keterikatan orang tidak hanya pada negara, tetapi juga komunitas lain, (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi); dan *keempat* yaitu seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warga negara.[12]

Menurut Roger M. Smith seperti yang telah disebutkan Smith mengatakan bahwa makna dari kewarganegaraan bahwa warga negara memiliki makna sebagai sebuah hak yang dimiliki setiap warga negara baik itu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan hak-hak hidup lainnya. Kewarganegaraan juga merupakan ststus hukum, keanggotaan suatu komunitas atau negara dan bukti konkrit itu ditegaskan oleh Smith dengan adanya tindakan nyata dari warga negara itu sesuai dengan ketentuan dan perilaku warga negara.

Apabila *civics* (ilmu kewarganegaraan) merupakan bentuk dari sebuah disiplin ilmu maka *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan khusus kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegraan yang dimaksudkan sebagai upaya dalam menerapkan *civics* (Ilmu Kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. Lalu John J. Cogan membedakan istilah kewarganegaraan (menurut bahasa Indonesia) dalam dua pengertian yaitu:

> *"civic education* dan *citizenship education. Civic education* adalah pendidikan kewarganegraan dalam pengertian sempit yaitu sebagai bentuk pendidikan formal. Seperti halnya sebuah mata pelajaran, mata kuliah atau kursus disebuah lembaga sekolah, univeritas, atau lembaga formal lainnya.

[12] *Ibid*., hlm.3

> Sedangkan *citizenship education* adalah sebuah pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mencakup bentuk pendidikan formal tetapi juga informal dan non formal."[13]

Hubungan antara *Civics* dengan *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah *civics* memberikan landasan dasar bagi berkembangnya kewarganegaraan melalui proses pendidikan sehingga dapat dikatakan bahwa *civics* sebagai ilmunya dan PKn sebagai pelaksananya.[14]

Selain itu menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara . Dari pengertian PKn diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PKn dengan materi pokoknya yaitu demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan di masyarakat.

PKn menjadi penting ketika pemerintah menetapkannya menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilihat dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat PKn yang pada prinsipnya bertujuan membentuk warga negara yang baik untuk masa depan.

Pada hakikatnya PKn merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri

---

[13] *Ibid*., hlm.5
[14] Yuyus Kardiman dan Yasnita Yasin, *op.cit.,* hlm.10.

dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan PKn adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.[15] Selain itu Nu'man Soemantri[16] mengatakan bahwa:

> Mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyrakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokrartis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Selain itu mata Pelajaran PKn sebagaimana tercantum dalam susunan kurikulum PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.[17]

Dari pengertian PKn tersebut maka dapat dirumuskan bahwa PKn mencakup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral/ karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannnya serta bertanggung jawab.

---

[15] Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Tim ICCE UIN-Jakarta: Jakarta,2008), hlm.5.
[16] Numan Soemantri. *Metode Mengajar Civics*. (Erlangga: Jakarta,2001)., hlm.299.
[17] Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

PKn memiliki peranan penting sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis. Maka dari itu PKn dituntut dapat mengembangkan kelas sebagai laboratorium demokrasi yang menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Dengan demikian mata pelajaran PKn merupakan proses yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di dalam masyarakat.[18]

Civic education memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal.[19] *Citizenship education* berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal dengan masyarakat madani (*civil society*). Sedangkan *civic education* atau disebut juga mata pelajaran PKn memiliki visi formal pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. PKn paradigma baru berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan pada visi mata pelajaran PKn tersebut, maka dapat dikembangkan misi mata pelajaran PKn paradigma baru menuju Indonesia baru dengan konsepsi masyarakat madani sebagai tatanan ideal sosial kulturalnya, yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu menciptakan kompetensi siswa agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi

[18] Cholisin. *Materi Pokok IKN-PKN*. (Universitas Terbuka: Jakarta,2000), hlm.17.
[19] Winarno. *op.cit*., hlm.11

kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan karakter dan keterampilan warga negara. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

1. Misi sosio-pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, dan taat hukum, beradab dan religius.
2. Misi sosio-kultural memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praktis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab.
3. Misi substansif-akademis mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk didalamnya konsep, prisnip, dan generalisasi mengenai yang berkenaan dengan *civic virtue* atau kebijakan kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan.[20]

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa visi PKn adalah menciptakan masyarakat yang demokratis, dari visi tersebut maka dapat dikembangkan misi PKn yaitu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, demokratis, dan taat hukum, beradab dan religius, serta memfasilitasi sistem kepercayaaan nilai, konsep, prinsip, dan praktis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab terhadap. PKn sekolah juga memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya:

[20] *Ibid*., hlm.12

> "Indonesia harus menghindari sistem pemerintah otoriter yang memegang hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu perlu juga ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilkau anti korupsi, kolusi dan nepotisme." (bagian Pendahuluan bidang studi PKn Permendiknas No.22 Tahun 2006)[21]

Dari pernyataan di atas kehidupan demokrasi akan tumbuh dengan kuat tidak hanya oleh bentuk pemerintahan yang demokratis, tetapi juga didukung oleh kehidupan demokratis dalam diri setiap warga negara. Kehidupan demokratis ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan yang mampu menanamkan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan akan pentingnya demokrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran PKn.

Dari tujuan PKn tersebut, maka PKn memiliki tujuan dalam membentuk warga negara mulai dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) yang dibagi dalam keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi. Kemudian tujuan selanjutnya komponen *civic dispotition* (karakter kewarganegaraan).[22] Perilaku demokratis ini masuk ke dalam *civic skills*.

Apabila mengikuti konseptual PKn dalam arti luas, sesungguhnya Indonesia telah melaksanakan visi dan misi PKn sejak tahun 1957, khusunya pada tingkat sekolah. Perkembangan PKn sendiri seperti berikut:[23]

---

[21] *Ibid*., hlm. 22
[22] *Ibid*., hlm.19
[23] *Ibid*., hlm. 15

1. Kewarganegaraan tahun 1957
2. *Civics* sebagai pengganti Kewarganegaraan tahun 1961
3. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 1968
4. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975 dan 1984
5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994
6. Kewarganegaraan (*Citizenship*) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi
7. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 tahun 2006)

Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini. Meski demikian, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru harus mendasar pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, yang intinya relevan dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi.

Mata pelajaran PKn yang mempunyai visi khas, yakni terbentuknya warga negara yang baik *(good citizen)* dalam rangka penanaman karakter. Dengan tujuan tersebut maka peserta didik yang juga sebagai warga negara dan penerus bangsa akan memiliki sikap yang kritis dan tanggung jawab yang akhirnya akan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bernegara.

C. Hakikat Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT)

Metode pembelajaran terdapat dua kata, yaitu metode dan pembelajaran. Secara etimologis metode berasal dari kata ‘*met*’ dan ‘*hodes*’ yang berarti melalui, sedangkan istilah metode adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai

suatu tujuan. Sehingga terdapat dua hal penting yang terdapat dalam metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaan.

Menurut Slameto[24] metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Wiradi metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan) yang tersusun secara sistematis (urutannya logis). Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.[25]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya yang tersusun secara sistematis yang akan digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam pembelajaran.

Pemilihan metode mengajar yang tepat oleh seorang guru atau calon guru akan dapat membantu siswa belajar secara efektif dan efisien. Untuk dapat memilih suatu metode mengajar yang sesuai, dengan penguasaan tersebut pengetahuan yang dikuasai semakin luas, terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam berbagai hal, strategi sering disamakan dengan metode padahal keduanya dapat dikatakan berbeda. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang tepat digunakan untuk melaksanakan strategi.[26] Kriteria pemilihan metode mengajar dalam menjalankan pembelajaran berada ditangan guru. Metode apapun yang digunakan oleh pendidik/guru dalam

---

[24] Slameto. *op.cit.*, hlm. 82
[25] Hamzah B. Uno dan Nurdin. *Belajar dengan Pendekatan PAIKEM*. (Bumi Aksara: Jakarta 2012), hlm.7.
[26] Sutardjo Adisusilo. *op.cit.,* hlm. 86

proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.

Prinsip- prinsip tersebut yaitu[27]: *Pertama,* dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Guru harus memandang anak didik sebagai suatu yang unik, tidak ada dua orang anak didik yang sama. *Kedua*, belajar dengan melakukan (*Learning by Doing*) dan dapat menimbulkan penguatan dan motivasi yang kuat pada siswa. Supaya proses belajar itu menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apa yang akan dipelajarinya. *Ketiga,* mengembangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan efektif. *Keempat*, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi serta terjadinya interaksi siswa dengan lingkungannya. Proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik. Kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah.

Hanya saja dalam penggunaan metode pembelajaran juga harus melihat suatu kondisi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Misalnya saja dengan metode pembelajaran tertentu pendidik dapat mempengaruhi tingkat kedewasaan moral peserta didik. Jadi sungguh tidak masuk akal jika peserta didik dari tingkat TK diajak untuk berdiskusi tentang dilema moral.

Pada anak-anak yang berusia 9-12 tahun yang menurut Piaget[28] pada anak-anak yang berusia 9-12 tahun berada dalam tahap operasional formal, sangat dianjurkan bahan diskusi moral karena mereka telah siap untuk berkembang dari tahap dua ke tahap berikutnya yang lebih tinggi.

---

[27] Slameto. *op.cit.*, hlm. 27-28.
[28] Sutarjo Adisusilo. *op.cit.,* hlm. 125

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu metode mengajar. [29] Faktor tersebut yang dimaksud adalah murid, tujuan, situasi, fasilitas, pengajar atau guru. Perpaduan pengaruh faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan metode mana yang paling baik untuk secara optimal berpengaruh atas dan terhadap faktor-faktor tersebut. Slameto[30] dalam bukunya Proses Belajar Mengajar menyatakan bahwa sekali suatu metode kita pilih maka itu berarti kita menerima kelemahannya disamping keunggulannya. Kriteria pemilihan metode mengajar menurutnya adalah sebagat berikut : (1) Tujuan pengajaran, (2) Materi pengajaran, (3) Besar kelas (jumlah siswa), (4) Kemampuan siswa, (5) Kemampuan guru, (6) Fasilitas yang tersedia, (7) Waktu yang tersedia.

VCT merupakan metode menanamkan nilai *(values*) yang merujuk pada pendekatan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan/kemantapan nilai. Menurut Masnur muslih,[31] *value clarification technique* memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai- nilai mereka sendiri. Sutarjo juga berpendapat bahwa VCT adalah suatu metode pendidikan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya.[32] Hall juga mengemukakan bahwa teknik klarifikasi nilai (VCT) sebagai:

---

[29] Slameto. *op.cit.*, hlm. 97
[30] *Ibid*., hlm. 98.
[31] Masnur Muslih. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. (Bumi Aksara: Jakarta,2011), hlm.116.
[32] Sutarjo Adisusilo. *op.cit.*, hlm 141.

> *By value clarification we mean a methodology or process by which we hel a person to discover values througt behavior feelings, ideas, and throght important choice he has made and continually, in fact, action upon in and throught his life*
> (artinya dengan klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghafal dan tidak "disuapi" dengan nilai-nilai yang sudah dipilihkan pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan menganalisis, mempertanggungjawabkan mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri).[33]

Berdasarkan pendapat Hall, metode VCT membuat peserta didik tidak dipilihkan nilai-nilai yang baik dan benar untuk dirinya melainkan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri nilai-nilai mana yang mau dikejar, diperjuangkan, dan diamalkan dalam hidupnya. Dengan demikian peserta didik semakin mandiri, semakin mampu mengambil keputusan sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, tanpa campur tangan hal-hal yang tidak perlu oleh orang lain.

Lahirnya metode ini merupakan upaya untuk membina nilai-nilai yang diyakini. Sehubungan dengan timbulnya kekaburan nilai atau konflik nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Wina Sanjaya[34] bahwa metode pembelajaran dengan cara mengklarifikasi nilai atau *value clarification technique* merupakan pengajaran untuk membentuk siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Pada pembelajaran *value clarification technique* (VCT) ini guru mengharapkan siswa teribat aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan, dan bertindak

---

[33] *Ibid*., hlm.145.
[34] Wina Sanjaya. *op.cit.*, hlm.34

sesuai dengan keputusan yang diambil, mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam proses menilai, menggali dan mempertegas nilai-nilai yang dimiliki siswa. VCT menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *value clarification technique (VCT)* adalah suatu metode pembelajaran yang untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Selain itu dengan metode pembelajaran *Value Clarification Technique* ini memungkinkan peserta didik sebagai warga negara dapat berbuat secara aktif dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.

VCT dianggap cocok digunakan dalam pembelajaran PKn yang mengutamakan pembinaan aspek afektif. Menurut Wina Sanjaya,[35] pola pembelajaran VCT dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena sebagai berikut:

a. Mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral.
b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan.
c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dalam kehidupan nyata.

[35] *Ibid.*, hlm. 25

d. Mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya.
e. Mampu memberikan pengalaman belajar berbagai kehidupan.
f. Mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi berbagai nilai-moral naif yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang.
g. Menuntun dan memotivasi hidup layak dan bermoral tinggi.

Sedangkan Sutarjo Adisusilo[36] berpendapat bahwa VCT memberi penekanan pada usaha membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri yang tujuan dari pendekatan ini adalah: (1) membantu peserta didik untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; (2) membentu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya; (3) membantu peserta didik agar mampu menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nila-nilai, dan pola tingkah lakunya sendiri

Adapun kelebihan dari penggunaan metode *value clarification technique* ini yang memberikan penekanan pada usaha membantu peserta didik dalam mengkaji perasaadan perbuatannya, meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri, dan mendorongnya untuk membentuk sistem nilai mereka sendiri serta mempraktikannya dalam kehidupas sehari-hari.

[36] Sutarjo Adisusilo. *op.cit.,* hlm.142

Casteel[37] menulis ada enam alasan mengapa pendidikan seharusnya menggunakan VCT dalam pembelajaran nilai dikelas, yaitu:

1) VCT amat berguna bagi peserta didik untuk berlatih mengomunikasikan keyakinan, nilai hidup, cita-cita pribadi pada teman sejawat;
2) VCT berguna untuk berlatih berempati pada teman lain bahkan yang mungkin berbeda keyakinannya;
3) VCT berguna bagi peserta didik untuk memecahkan persoalan dilema moral;
4) VCT berguna bagi peserta didik untuk setuju atau menolak keputusan kelompok
5) VCT berguna bagi peserta didik untuk berlatih terlibat dalam membuat keputusan apapun mempertahankan atau melepaskan keyakinannya

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi tujuan pendidikan nilai, yaitu *pertama,* pendidikan nilai membantu peserta didik untuk berproses menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. *Kedua*, pendidikan nilai ini membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada orang lain berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri. *Ketiga,* pendidikan nilai ini juga membantu peserta didik agar mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku mereka sendiri dan akhirnya mendorong mereka untuk menghayatinya.

[37] *Ibid*., hlm. 151.

Menurut Daryono[38] sama halnya dengan metode pembelajaran yang lain yang mempunyai kekurangan, metode pembelajaran VCT juga mempunyai kekurangan antara lain:

a. Masalah nilai (value) merupakan masalah abstrak sehingga sulit diungkap secara kongkret
b. Terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah nilai yang sulit dihindari sehingga kadang-kadang mengandung kebingungan para siswa
c. Masalah nilai adalah masalah apa yang diinginkan, seharusnya (normatif) karena sering terdapat kesenjangan dengan apa yang terjadi dalam praktek nyata (empiris).

Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai metode pembelajaran *VCT* maka sebaiknya peneliti perlu mengambil hal positif yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat berlangsung seperti rencana penelitian yang diharapkan.

Pembelajaran VCT yang diimplementasikan dalam proses belajar mengajar dijalankan secara tahap demi tahap sebagaimana proses belajar mengajar pada umumnya. John Jarolimek[39] menjelaskan langkah pembelajaran dengan VCT dalam tujuh tahap yang dibagi dalam 3 tingkat:

a. Kebebasan memilih pada tingkat ini terdapat 3 tahap:
   (a) Memilih secara bebas;
   (b) Memilih dari beberapa alternatif;

[38] M. Daryono. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan* Kewarganegaraan. (rineka Cipta: Jakarta, 2011), hlm. 135
[39] *Ibid.*, hlm. 21.

(c) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya.

b. Menghargai terdiri dari 2 tahap pembelajaran:

(a) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya

(b) Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum.

c. Berbuat, terdiri atas:

(a) Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya;

(b) Mengulangi prilaku sesuai dengan nilai pilihannya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembelajaran VCT dengan media kartu penilaian. Menurut Kosasih[40], media kartu penilaian baik untuk membina, klasifikasi masalah dan pemecahannya secara rasional untuk selanjutnnya menentukan sikap/pendirian penilaiannya. Format yang digunakan tergantung pada masalah yang akan dipecahkan.adapun kartu penilaian yang lengkap yang memuat Nama lengkap siswa, Masalah yang akan dipecahkan/dinilai, Data fakta yang dijadikan sumber, Analisa pertimbangan atas dasar segi positif dan segi negatif, Kesimpulan, Pemecahan masalah dan alasannya.

Langkah – langkah operasional metode *VCT* tipe kartu penilaian ini berdasarkan Daryono[41], meliputi langkah – langkah sebagai berikut :

a. Menyusun atau membuat kartu penilaian

b. Membentuk kelompok siswa serta memberi petunjuk untuk mempersiapkan bahan materi yang akan digunakan oleh siswa

c. Menentukan peristiwa yang merupakan dilema

---

[40]Wina Sanjaya. *op.cit.,* hlm. 284.
[41]M. Daryono, *op.cit.*, hlm. 137

d. Menentukan alternatif-alternatif apa yang akan dikerjakan untuk memecahkan dilema
e. Menentukan akibat-akibat apa yang akan terjadi dari masing-masing alternatif yang akan dikerjakan
f. Jika akibat-akibat itu terjadi (tahap no.3) bagaimana akibat dalam jangka panjang dan jangka pendek
g. Fakta atau bukti apa yang menunjukan bahwa akibat-akibat itu akan terjadi
h. Mengadakan penilaian mengenai akibat mana yang baik dan akibat mana yang buruk berdasarkan pada kriteria tertentu
i. Mengambil keputusan nilai mana yang akan dilaksanakan

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam metode pembelajaran VCT terdiri dari tiga tingkatan yaitu kebebasan memilih, menghargai dan berbuat.

VCT dalam rangka pendidikan nilai, keterampilan berkomunikasi, perlu mendapat perhatian utama dan perlu didahulukan pengembangannya, hal ini dapat dilakukan dengan model *value problem solving*, dialog, diskusi kelompok, presentasi, dan lain-lain. Sejumlah ahli pendidikan nilai seperti Hermin, dkk. yang menyatakan bahwa dari sekian metode pembelajaran nilai maka VCT lah yang lebih efektif dan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan metode atau pendekatan lainnya. Metode ini juga sesuai dengan ranah demokrasi karena setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih, menentukan, mengolah, dan

mengembangkan nilai-nilainya sendiri dan tentunya dengan didampingi oleh seorang pendidik.[42]

Menurut Harmin, dkk.[43] penerapan klarifikasi nilai akan efektif bila fasilitator atau pendidik dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bersikap menerima dan tidak mengadili pilihan nilai peserta didik, menghindari kesan memberi nasihat, menggurui seakan pendidik lebih tahu dan lebih baik.
b) Memberikaan adanya kebhinekaan pandangan dialog dilakukan secara terbuka, bebas dan individual.
c) Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi (*sharing*) atau tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap.
d) Menghargai jawaban/respons peserta didik, tidak memaksa peserta didik untuk memberi respons tertentu apabila memang peserta didik tidak menghendakinya
e) Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan pilihan dan mengambil sikap secara jujur
f) Mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi nilai hidup
g) Mahir megajukan/membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi dan sosial.

Jika dilihat dari penerapan metode pembelajaran VCT ini sangatlah menekankan sikap demokratis dari seorang guru. Hal ini yang seharusnya juga bisa ditularkan kepada peserta didik untuk bersikap dan berperilaku demokratis kepada sesama, baik teman, guru, dan lain sebagainya. Maka dari itu metode pembelajaran VCT diharapkan dapat membentuk perilaku demokratis peserta didik.

---

[42] Sutarjo Adisusilo. *op.cit.,* hlm. 144
[43] *Ibid*., hlm. 156.

D. Metode *Problem Based Learning* (PBL)

Metode Problem Based Learning jika dilihat dari aspek psikologi belajar bersandarkan pada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.[44] *Problem Based Learning* dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang diadapi secara ilmiah. Untuk mengimplementasikan *Problem Based Learning* guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkunagn sekitar, dari peristiwa keluarga atau dari peristiwa kemasyarakatan.

Adapun tahapan dalam melakukan metode *problem based learning* ini yang dikemukakan oleh John Dawey[45] yang merupakan ahli pendidikan berkebangsaan Amerika menjelaskan ada enam tahap, yaitu:

1. Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan
2. Menganalisis, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang.
3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya
4. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah

---

[44] Wina Sanjaya. *op.cit*., hlm. 213.
[45] *Ibid*., hlm. 219

5. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan
6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan

Dalam metode *problem based learning* siswa diharapkan mampu meneliti, mengemukakan penapat, menerapkan pengetahuan sebelumnya, memunculkan ide-ide, membuat keputusan-keputusan.[46] Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode problem based learning ini. Keunggulannya antara lain:

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran dikelas tetapi juga masalah yang ada di kehidupan sehari-hari
b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman
c. Mengakrabkan guru dengan siswa dan membiasakan siswa melakukan eksperimen.

Sementara itu kelemahannya, yaitu:

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.
b. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang
c. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.

[46] Miftahul Huda. *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. (Pustaka Pelajar: Bandung, 2014). hlm. 270

d. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari makamereka tidak akan balajar apa yang mereka ingin pelajari.

Dari keunggulan yang ada ini mulai dari terbiasa menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan teman-temannya ini dapat meningkatkan perilaku demokratis karena siswa terbiasa menghadapi pendapat dari teman-temannya yang tentu saja berbeda-beda. Selain itu *problem based learning* ini juga dapat memupuk solidaritas antarteman sehingga akan menanamkan nilai saling menghargai, menghormati perbedaan dan keanekaragaman, dan kebersamaan. Maka, sangat dibutuhkan nilai-nilai demokrasi di dalam pembelajaran dengan metode *problem based learning*.

Hal ini diperkuat dengan langkah-langkah pembelajaran dari *problem based learning* diharapkan peserta didik dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan mulai dari tahap merumuskan masalah bersama dengan teman kelompoknya, menganalisis yang mengasah peserta didik dalam berpikir secara kritis dari berbagai sudut pandang yang berbeda membuat peserta didik harus menerima adanya perbedaan pendapat dengan teman-temannya sehingga dibutuhkan juga nilai-nilai demokrasi pada proses pembelajaran. Hingga pada tahap terakhir dalam langkah-langkah pembelajaran yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah.

E. Perbedaan dan Persamaan Metode VCT dan Metode PBL

Pembelajaran metode VCT dan metode PBL tentunya memiliki perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan dan persamaan yang dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Metode VCT dan PBL

No	Metode VCT	Metode PBL
1	Mampu membina dan menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik pada diri siswa dalam suatu materi misalnya pada nilai kebebasan mengemukakan pendapat dalam materi kedaultan rakyat	Membina siswa dalam pemecahan suatu masalah. Siswa diberikan keterampilan dalam memecahkan masalah tanpa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masalah
2	Memiliki beberapa teknik dalam mengungkapkan suatu nilai, seperti teknik menganalisa suatu kasus yang terjadi di masyarakat, melalui teknik menilai baik-buruk suatu permasalahan, melalui teknik wawancara, inkuiri nilai, dengan cara ini siswa berlatih berfikir kritis, analitis, dan mengembangkan rasa ingin tahu sehingga berusaha untuk mengungkapkan suatu nilai yang baik atau menyimpang	Memiliki satu teknik yaitu teknik pemecahan masalah yang dapat mengembangkan sikap berfikir kritis siswa tanpa menanamkan suatu nilai yang baik sehingga perlu dilakukan oleh siswa atau nilai-nilai yang dianggap menyimpang sehingga tidak baik dilakukan oleh siswa

3	Langkah langkah pembelajaran dengan metode *value clarification technique* dibagi menjadi tiga, yaitu: Kebebasan memilih Menghargai, dan Berbuat	Langkah-langkah pembelajaran *problem based learning*, yaitu: Merumuskan masalah Menganalisis Merumuskan hipotesis Mengumpulkan data Pengujian hipotesis Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah
4	Metode VCT ini dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dari langkah-langkah yang telah disebutkan secara tepat dilihat bagaimana peserta didik dalam memilih dan kemudian pilihan-pilihan tersebut harus dipilih kembali sebagai pilihan alternatif yang paling tepat, perasaan menghargai atas keputusan yang telah dibuat, dan kemauan untuk berbuat dengan rasa percaya diri atas nilai yang telah dipilihnya.	Metode PBL lebih tertuju bagaimana dalam memecahkan masalah walaupun didalamnya juga dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi. Seperti, dalam menganalisis yang mengasah peserta didik dalam berpikir secara kritis dari berbagai sudut pandang yang berbeda membuat peserta didik harus menerima adanya perbedaan pendapat dengan teman-temannya sehingga dibutuhkan juga nilai-nilai demokrasi pada proses pembelajaran.

Tabel 2.2

Persamaan Metode VCT dan PBL

No	Metode Pembelajaran VCT dan Metode Pembelajaran PBL
1	Sama-sama merupakan metode pembelajaran inovatif yang dapat menggali daya analisis siswa terhadap suatu permasalahan yang terjadi
2	Sama-sama menggunakan kasus-kasus/permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik
3	Sama-sama memerlukan kreativitas guru dalam menyajikan kasus-kasus yang berkenaan dengan materi yang diajarkan
4	Sama-sama dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik

F. Kerangka Berpikir

Pendidikan politik demokrasi di Indonesia merupakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Suatu pendidikan demokasi tumbuh dengan kuat bukan hanya karena bentuk pemerintahan yang demokratis tetapi juga di dukung oleh kehidupan demokratis dalam diri warga negaranya. Kehidupan yang demokratis ini hanya bisa dilakukan melalui pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada setiap warga negara. Pendidikan akan pentingnya demokrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran PKn.

Sebagai pendidikan demokrasi, PKn menanamkan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat yang demokratis di masyarakat akan tumbuh kokoh jika dikalangan masyarakat sendiri tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di masyarakat adalah toleransi, kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat,

terbuka dalam komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan.

PKn dengan misi yang demikian dibebankan dalam pearturan UU No. 20 Tahun 2003 sebagai mata pelajaran yang dapat membangun sikap dan perilaku demokratis dan lain sebagainya teryata tidak berbanding lurus kenyataannya pada proses pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran PKn memiliki kelemahan yang sudah pasti dipahami. PKn dalam proses belajar yang masih belum maksimal. Dalam PKn, sangat diutamakan pendekatan yang berbasis pada berpikir kritis guna membentuk warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Buku-buku pelajaran PKn sekolah yang cenderung berisi mengenai hafalan mengenai konsep, definisi, peristiwa, dan kejadian. Sehingga, jarang sekali buku teks PKn yang mampu pengetahuan bentuk proposisi dan teori sebuah fenomena. Mau tidak mau, guru PKn harus menyajikan menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda kepada para peserta didik dalam rangka membentuk warga negara yang sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran hendaknya guru menerapkan metode pembelajaran yang mengedepankan peran aktif siswa sehingga diharapkan iklim belajar menjadi lebih kondusif, mampu mengembangkan pemahaman peserta didik yang pada akhirnya dapat mengaplikasikan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

Penggunaan Metode pembelajaran VCT merupakan metode pembelajaran yang menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat

keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai *student centered* daripada *teacher centered*. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung dengan berbasis pada aktivitas siswa. Dengan demikian maka proses belajar dan pembelajaran mengintegrasikan aktivitas moral, sosial, dan spiritual sehingga akumulasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan tidaklah bebas nilai (*value free*). Dengan metode pembelajaran VCT diharapkan siswa dapat memahami nilai demokrasi dan pada akhirnya dapat berperilaku demokratis.

G. Penelitian Yang Relevan

1. Sariani,dkk.(2012) yang meneliti tentang "Pengaruh Metode VCT (*Value Clarification Technique*) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas VIII SMPN 03 Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menujukan bahwa adanya pengaruh Metode VCT terhadap meningkatnya motivasi belajar PKn dengan membandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelas Kontrol, dimana pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah biasa.
2. Widianti Sofiani (2012) yang meneliti tentang "Perbedan Hasil Belajar Siswa PKn Melalui Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* dengan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)" studi komparatif di SMP Negeri 140 Jakarta. Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model VCT lebih tinggi daripada yang menggunakan model pembelajaran PBL.

H. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis ini dirumuskan bahwa terdapat “pengaruh penggunaan metode pembelajaran *value clarification technique* (VCT) pada pembelajaran PKn terhadap perilaku demokratis” peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 109 Jakarta Timur.